

## **PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA**

**Oleh:  
Alfan Miko**

*Education is a systematic effort to develop the intellectual life of the nation, in line with the message and guidance of the Indonesian 1945 constitution. Nevertheless, in the practice the education faces various dilemmas, particularly as it is connected to the economic development that sustainly being carried out here. The economic development pushes the education to serve its interest. Besides, inconsistency on the educational policy that taken by the government is a crucial issue: any new minister of education tend to produce new and different policies. Our system of education seems to quickly produce policies but so weak at the level of implementation.*

### **Pendahuluan**

Kebijakan pendidikan nasional di Indonesia didasari oleh pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Dalam kaitan dengan pendidikan, pembukaan UUD 1945 menyatakan, ". . . . . untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, . . . . .". Pernyataan pada alinea pembukaan UUD 1945 tersebut mencerminkan arah dan sikap perlunya pendidikan bagi bangsa Indonesia. Sementara itu dalam batang tubuh UUD 1945, pasal 31 dinyatakan bahwa;

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran

2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pelaksanaan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dimulai dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada saat kabinet presidensial pertama Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pengalaman menunjukkan bahwa tiap pergantian pimpinan departemen sering pula diikuti perubahan dalam kebijakan dan strategi pelaksanaan pendidikan. Hal ini disebabkan upaya dan tindakan sebelumnya dianggap kurang sesuai dengan kebijakan baru yang diinginkan. Akibatnya adalah tidak terjaminnya kontinuitas dan stabilitas pelaksanaan pendidikan nasional.

Salah satu usaha pertama untuk menjamin stabilitas dan kontinuitas pelaksanaan pendidikan nasional ialah dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 tahun 1950 yang berlaku untuk wilayah yang terbatas. Undang-undang tersebut kemudian diberlakukan untuk seluruh Indonesia dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1954. Pada masa itu undang-undang ini juga diharapkan menjadi pijakan untuk melakukan perubahan sistem pendidikan yang ditinggalkan oleh kolonialisme Belanda yang dianggap tidak mengakar pada rakyat Indonesia dan tidak merasa dimiliki rakyat.

Dalam perjalanannya, dinamika dan tuntutan terhadap perkembangan dunia pendidikan, tidak diikuti oleh penerbitan dan pemberlakuan kebijakan yang menunjang kearah terselenggaranya sistem pendidikan yang tepat dan relevan

dengan kondisi zamannya. Dalam implementasinya, kebijakan-kebijakan pendidikan yang lama tidak lagi mampu mengantisipasi perkembangan sektor pendidikan. Barulah pada tahun 1989, diperbaiki dan diberlakukannya undang-undang sistem pendidikan yang baru yang dinyatakan sebagai standarisasi sistem pendidikan nasional.

Sejak saat itu dunia pendidikan di Indonesia memiliki standarisasi kebijakan berupa UU No. 2/ 1989 mengenai sistem pendidikan nasional, sehingga berbagai kebijakan yang dibuat senantiasa merujuk UU tersebut. UU No. 2/1989 ini bersumber dari pasal 31 UUD 1945, yang kemudian diturunkan ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam GBHN 1988 termuat antara lain tentang tujuan pendidikan nasional, yang mengandung sedikitnya 16 butir jabaran (Moedjanto;1993). Dalam bahasa yang sederhana, dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mewujudkan manusia Indonesia yang berotak, berwatak dan berkecakupan.

Penjabaran tujuan pendidikan nasional yang demikian itu telah mendukung usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang terkenal dalam lima tahun terakhir yang dianggap sebagai modal dasar pembangunan. Jika ditelusuri jabaran GBHN tersebut lebih lanjut memperlihatkan bahwa kebijakan pembangunan nasional menyatakan peranan pendidikan mengabdikan untuk kepentingan ekonomi. Artinya, peranan pendidikan lebih diprioritaskan untuk mempersiapkan tenaga kerja guna menopang proses produksi dari pada untuk

melaksanakan peranan pendidikan yang lain, seperti pemerataan pendapatan dan pengembangan disiplin sosial.

Saat ini, merujuk UU No. 2/1989 tentang sistem pendidikan nasional yang termuat didalamnya tentang tujuan pendidikan nasional dan beberapa pasal kurikulum telah menjadi alasan disusun, dikembangkan dan diberlakukannya kurikulum 1994. Kurikulum itu pada dasarnya memuat rencana pengajaran yang menyangkut pengembangan intelektualitas, moralitas dan ketrampilan peserta didik. Kurikulum baru ini dalam beberapa hal telah merubah kembali substansi dan arah pendidikan nasional. Namun pihak pemerintah membantah bahwa tindakan pemberlakuan kurikulum baru ini merupakan warisan penyakit lama, dimana berganti menteri bertukar kebijakan.

Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah kebijakan yang diterbitkan memiliki berbagai permasalahan ditingkat pengimplementasiannya. Hal ini sejalan dengan kondisi hampir disemua negara-negara berkembang, dimana formulasi kebijakan-kebijakan mudah diterbitkan karena kuatnya posisi para eksekutif, namun sulit untuk diterapkan karena menghadapi kendala-kendala dilapangan. Berbeda dengan dinegara maju, kebijakan-kebijakan yang diusulkan lebih banyak terbentur ditingkat formulasi ketimbang implementasi, disebabkan sengitnya diskusi yang dilakukan dalam merumuskan dan memutuskan kebijakan tersebut. Sehingga dalam pengimplementasiannya tidak menemukan kendala yang berarti.

### **Realitas Pendidikan Di Indonesia Dewasa Ini**

Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 menyatakan bahwa sasaran bidang pembangunan jangka panjang kedua (PJPT II) adalah mengarahkan pembangunan pendidikan pada peningkatan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia Indonesia serta meningkatkan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan harus dipenuhi melalui peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, pembaruan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam hal pemerataan kesempatan pendidikan untuk tingkat SD, pada dasarnya telah dimulai pada awal 1970-an yang lalu dengan dicanangkan program SD Inpres untuk mempercepat peningkatan pendidikan rakyat diseluruh Indonesia, khususnya pada usia sekolah. Disamping itu juga dicanangkan program wajib belajar enam tahun, yang kemudian pada tahun-tahun terakhir ini ditingkatkan menjadi wajib belajar sembilan tahun. Secara kuantitatif, program ini telah memberi hasil yang positif dengan semakin tingginya persentase penduduk yang melek huruf. Namun yang jadi masalah adalah tingginya persentase (38 %) anak-anak tamatan SD yang tidak melanjutkan sekolah ketingkat yang lebih tinggi (Republika, 1993). Menurut hasil survei Susenas hal ini disebabkan alasan biaya (69, 19 %), menganggap pendidikan sudah cukup (11, 18 %), mencari pekerjaan (4, 52%), jauhnya lokasi sekolah/tidak ada sekolah (4, 4 %), merasa pikirannya

tidak mampu (2, 42 %) dan karena sebab lainnya (8, 29 %) (Mustrofin, 1993).

Kendati angka tamatan SD yang tidak melanjutkan sekolah secara nasional adalah 38 %, namun jika dianalisis lebih jauh untuk daerah luar Jawa angka yang ditunjukkan lebih tinggi yaitu antara 45 % s/d 51 %. Hal ini merupakan salah satu cerminan terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah, yakni ketimpangan antara pembangunan kota dan pembangunan desa. Tingginya persentase yang menyatakan tiadanya biaya melanjutkan sekolah ketingkat yang lebih tinggi merupakan alasan yang sangat tragis. Kenyataan ini sekaligus memperkuat debat dan gugatan mengenai arah pembangunan yang harus dipilih, yaitu antara berorientasi pertumbuhan atau pemerataan. Artinya, yang terjadi adalah tidak meratanya jumlah penduduk yang menikmati hasil-hasil pembangunan selama ini.

Alasan masyarakat yang menyatakan jarak sekolah terlalu jauh (yang berarti juga tidak ada sekolah dilingkungannya) meskipun tidak terlalu menyolok persentasenya namun perlu dicermati. Hal ini sebetulnya bisa ditafsirkan buah dari model pembangunan yang berpihak kepada daerah perkotaan (*urban bias*) sehingga sekolah-sekolah yang merupakan *public utilities* lebih banyak dibangun dan dikonsentrasikan pada daerah perkotaan atau daerah pedesaan yang mudah dijangkau dengan menggunakan sarana transportasi. Akibatnya penduduk yang tinggal di daerah-daerah tingkat aksesibilitasnya rendah mendapatkan pelayanan pendidikan yang juga rendah. Bukankah hal ini refleksi dari terjadinya hubungan "kota-desa" yang bersifat eksploitatif dan menguntungkan orang kota.

Perlakuan yang seragam terhadap ketidakseragaman kualitas berbagai sekolah di atas sepertinya pemerintah menganut pendekatan fungsional di dalam menerapkan kebijakan pendidikan. Menurut aliran fungsional, sekolah itu bersifat fungsional dan menghendaki orang diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pendekatan ini sepertinya mengabaikan perlunya tercipta *equality* dalam berbagai hal sebelum memberikan perlakuan yang sama. Kesetaraan yang dimaksud adalah dalam hal *equality of acces*, *equality of survival*, *equality of output* dan *equality of outcome* (Farrel, 1982). Pendekatan fungsional ini dikritik oleh pendekatan konflik yang menyatakan bahwa tidak cukup hanya sekedar memberikan kesempatan yang sama pada masing-masing orang, pada orang yang tidak sama tetap akan menemui berbagai kegagalan. Untuk itu bagi orang yang tidak sama, perlu diberikan kesempatan yang berbeda pula.

Pada tingkat pendidikan tinggi, perguruan tinggi di Indonesia melahirkan potensi sumber daya untuk berkiprah di berbagai sektor pembangunan. Secara eksplisit peranan dan fungsi pendidikan adalah mempertahankan keberlangsungan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang hakiki dan sebagai pengarah perubahan perkembangan. Namun menurut Sudjatmoko, seperti yang dikutip Juoro (1981), menyatakan bahwa perguruan tinggi kita masih memiliki berbagai kelemahan. Kelemahannya terletak pada kekakuan dan kekurangpekaan atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sedang berubah. Peran perguruan tinggi sebenarnya tidaklah semata-mata membatasi diri pada transformasi ilmu pengetahuan

dan teknologi yang telah sophisticated, tapi juga dapat menciptakan pengetahuan dan teknologi baru melalui serangkaian penelitian. Dengan demikian perguruan tinggi bukanlah tempat "pelatihan masal", tapi tempat dimana terjadi pembentukan dan transformasi *cultural capital* pada peserta didik.

Selain itu, kelemahan sistem pendidikan itu sendiri, khususnya pendidikan tinggi, adalah sifatnya yang lebih memperkuat daripada memperlemah ketidaksamaan sosial. Menurut Raymond Boudon (1977) *equality* di bidang pendidikan tidak mampu merubah dan meningkatkan kehidupan masyarakat, karena pendidikan sebagai alat *social reform* sangat terbatas efektifitasnya, karena masih banyaknya aspek struktural yang menentukan stratifikasi sosial. Bahkan menurut Collin dari pendekatan konflik, pendidikan merupakan alat yang mempertahankan ketimpangan dalam masyarakat.

Wajar jika kemudian muncul gugatan terhadap elitisme pendidikan atau lemahnya pemerataan pendidikan. Padahal salah satu tujuan kebijakan pendidikan nasional adalah tercapainya pemerataan pendidikan ini. Menurut Ki Supriyoko (Kompas, 3 Mei 1993) konsep pemerataan pendidikan ini dari tahun selalu mendapat ujian. Sekarang pelayanan pendidikan cenderung lebih dinikmati kaum elit. Bukan saja elit intelektual akan tetapi juga elit ekonomikal.

Meskipun tidak berarti bahwa aspek kemampuan tidak berbicara sama sekali dalam menjaring peserta didik, tetapi situasinya telah terkondisi memberi angin bagi kaum berduit



mendapat prioritas dalam pelayanan pendidikan. Keadaan ini lebih terasa pada jenjang pendidikan tinggi. Hampir pada semua pelayanan pendidikan yang baik diisi oleh orang berduit, yang sekaligus bisa disebut orang kota.

Sementara itu keinginan orang tua dari lapisan masyarakat manapun untuk menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi semakin besar. Karena ada anggapan yang pada kenyataannya tidak sepenuhnya benar bahwa lulusan perguruan tinggi merupakan tiket untuk mendapatkan posisi kerja yang lebih baik. Drost SJ (Kompas, 1 Mei 1993) mengingatkan agar para orang tua mengubah keinginan mereka untuk mengharapkan anak-anaknya melanjutkan sekolah ke jenjang universitas. Sudah saatnya pandangan seperti itu disingkirkan, karena pandangan tersebut keliru sama sekali. Tidak seluruh tamatan SLTA layak melanjutkan ke universitas. Dalam pasar kerja di masyarakat, kebutuhan akan tenaga terampil justru lebih banyak dihasilkan oleh sekolah kejuruan dan akademi.

Dalam sistem pendidikan di negara maju dikenal adanya tracking system. Dimana pada tingkat sekolah lanjutan peserta didik telah diarahkan sedemikian rupa untuk memilih, melanjutkan atau tidak ke perguruan tinggi. Masyarakat di negara maju menyadari tidak mudah dan bukan sembarang orang dapat masuk universitas. Lagi pula banyak lahan pekerjaan yang tidak menuntut lulusan universitas. Sehingga ditingkat sekolah lanjutan mereka telah menentukan sikap untuk melanjutkan atau tidak ke universitas.

Namun tingginya aspirasi orang tua menyekolahkan anaknya, saat ini bertolak belakang dengan fenomena baru

dimana banyaknya calon mahasiswa yang telah diterima di universitas tertentu, yang ternyata tidak mendaftar ulang. Sinyalemen yang muncul atas peristiwa ini adalah mulai jenuhnya masyarakat terhadap program-program studi tertentu, khususnya di bidang ilmu kependidikan (Supriyoko, *Kedaulatan Rakyat*, 4 September 1992). Disisi lain, hal ini bisa ditafsirkan bahwa masyarakat semakin kritis dalam menentukan pendidikan yang ditempuh. Apalagi tidak ada jaminan bahwa tamatan perguruan tinggi akan segera diterima didunia kerja. Hal ini barangkali mereka sadari dari tingginya tingkat pengangguran terdidik sehingga mereka lebih memilih untuk masuk pada pendidikan singkat atau pendidikan non-formal.

#### **Sektor Pendidikan dan Pembangunan Nasional**

Seperti telah dijelaskan di atas, pendidikan dalam arti yang luas adalah suatu proses yang berkaitan dengan upaya mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup dan ketrampilan hidup pada diri setiap peserta didik. Namun dalam perkembangan masyarakat, pendidikan lebih banyak dilihat sebagai lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi baru memasuki dunia kerja, dengan meningkat aspek ketrampilan hidup. Diakui secara sadar atau tidak, porsi tuntutan tugas ini lebih dominan dibandingkan dengan tugas hakiki pendidikan sendiri, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa (Zamroni, 1994). Akibatnya, kegagalan transformasi dari dunia pendidikan kedunia kerja, dengan indikator semakin besarnya angka pengangguran, akan

ditimpakan pada dunia pendidikan. Belum lagi fungsi pendidikan untuk meratakan pendapatan juga mengalami kegagalan.

Pendidikan yang dicerminkan dalam sistem persekolahan (*schooling*) pada dasarnya bertujuan sebagai wadah sosialisasi dalam bentuk transformasi nilai-nilai dan juga bertujuan memberikan pengajaran untuk meningkatkan ketrampilan. Efektifitas pendidikan sistem persekolahan yang menekankan aspek ketrampilan hidup dengan menitikberatkan pada penguasaan basic skill yang dilaksanakan dengan struktur yang kaku dan sistem sekolah yang otoriter telah gagal dalam melaksanakan transformasi sikap, pola pikir dan ketrampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi baik untuk dunia kerja maupun untuk pendidikan tinggi. Dengan kata lain, sekolah hanya menjanjikan sukses pendidikan ekonomi yang semu.

Pemerintah merupakan kekuatan utama yang mampu menentukan arah dan kebijakan pendidikan, disamping yang paling mampu menyediakan fasilitas pendidikannya. Pemerintah harus menjalankan pendidikan secara netral dari pertimbangan-pertimbangan persaingan ekonomi. Artinya, lembaga pendidikan bersifat mandiri dan otonom. Pemerintah akan cenderung menjadi tempat utama untuk mengorganisir hegemoni golongan elit masyarakat (Carnoy, 1986). Dengan kata lain, bahwa arah dan kebijakan pendidikan banyak dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan juga oleh kepentingan politik.

Kalau antara keduanya berkolaborasi untuk menekan dan mendominasi pendidikan, maka cenderung muncul apa yang

disebut *eco-paedological dictatorship*. Proses pendidikan yang sangat kaku dan penuh dengan aturan-aturan yang ketat untuk mencetak tenaga kerja bagi dunia industri. Pendidikan yang semacam ini akan cenderung memperlakukan peserta didik dan juga guru sebagai robot, inhuman dan impersonal. Hasilnya akan lahir lulusan-lulusan yang merupakan pribadi tanpa kreativitas dan kemandirian.

Munculnya problem sosial ekonomi, seperti produktifitas merosot, persentase penduduk miskin masih besar, dan pengangguran yang semakin besar akan selalu dikaitkan dengan pendidikan. Masyarakat akan menghakimi ketidakberdayaan lembaga pendidikan dalam mempersiapkan tenaga kerja. Memang secara teoritis pendidikan tidak saja akan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga akan meratakan kesempatan antar klas sosial dan meratakan pendapatan serta meningkatkan kualitas tenaga kerja. Namun, perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa pendidikan telah melewati batas produktifitasnya. Pendidikan dinyatakan tidak efisien dan tradisional hingga peserta didik didorong ke pinggir (*drop out*) atau tidak mampu memasuki lapangan kerja disektor industri modern. Disamping itu, peserta didik yang gagal dalam pendidikan akan gagal pula di dunia kerja, baik dalam arti hanya menempati hirarki tingkat bawah dalam dunia kerja atau menjadi penganggur.

Jadi dalam kepentingan pembangunan, sektor pendidikan lebih dilihat sebagai kegiatan yang sistematis dan terorganisir untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bersama teknologi dianggap sebagai *endogenous factor* dalam fungsi

produksi. Sikap seperti ini sejalan dengan semakin diakuinya betapa pentingnya sumber daya manusia dalam pembangunan bangsa. Hal ini sekaligus juga disebabkan perubahan orientasi dan pendekatan pembangunan yang semula mengandalkan keunggulan komparatif (*comparatif advantage*) menuju kearah menciptakan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) disebabkan seringnya terjadi kegagalan pasar (*market failure*).

Berdasarkan hal di atas dan ditambah oleh tingginya kompetisi di pasar dunia yang mau tidak mau harus dihadapi bangsa Indonesia maka memasuki PJPT II tampaknya telah terjadi perubahan orientasi pembangunan dengan lebih memberi perhatian kepada investasi modal manusia. Selama PJPT I pemerintah menjalankan kebijakan yang dikatakan minimalis, berupa perluasan kesempatan belajar khususnya di sekolah dasar, program latihan yang seadanya, serta program sains dan teknologi yang juga seadanya. Kebijakan tersebut berada pada *domain* kebijakan stabilitas ekonomi makro untuk mempertahankan tingkat inflasi yang rendah dan meningkatkan ekspor produk-produk padat karya dan hasil sumber daya alam. Memasuki PJPT II, kebijakan bergeser lebih bersifat *advocacy*, yang lebih eksplisit dalam menentukan tujuan industrialisasi, pengembangan sumber daya manusia yang lebih intensif, adaptasi teknologi, serta subsidi langsung pada sektor atau industri tertentu yang dianggap strategis.

Perubahan sifat kebijakan tersebut membawa konsekuensi perlunya dilakukan penyesuaian struktural dalam menunjang perkembangan industrialisasi. Penyesuaian struktural dilaksanakan setidaknya-tidaknya dengan dua kebijakan penting,

yakni kebijakan dibidang teknologi dan kebijakan di bidang sumber daya manusia. Kebijakan dibidang teknologi diperlukan untuk mengarahkan proses alih teknologi, riset pengembangan, pelatihan dan investasi asing yang mendukung alih teknologi tersebut. Sedangkan kebijakan sumber daya manusia diperlukan untuk mendukung kebijakan teknologi tersebut, seperti pembentukan kelembagaan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang dititikberatkan pada pengembangan pengetahuan dan ketrampilan dasar.

Pengalaman selama ini menyatakan betapa tertinggalnya Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia, bahkan bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari rendahnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk sektor pendidikan yang hanya 8 -10 % dari total pengeluaran, sementara pengeluaran negara tetangga mencapai 19 - 20 %. Bila dilihat dari segi GNP, pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan masih di bawah 2 %, sementara di Malaysia sudah mencapai 10%, serta di Singapura dan Korsel 5 % (Kompas, 2 Juni 1993).

#### **Kebijakan Pendidikan dalam PJPT II: Menuju Era Link and Match**

Pada PJPT II, pembangunan nasional Indonesia memasuki babak baru, yaitu tahap tinggal landas. Pembangunan tersebut bertumpu pada pengembangan industri sebagai hasil perkembangan di bidang sains dan teknologi.

Namun disadari bagaimanapun akan ditemukan berbagai hambatan, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Hambatan dari luar diantaranya adalah perubahan struktur perekonomian dunia sebagai akibat berkembangnya teknologi, serta berakhirnya perang dingin diantara negara berkuasa, bersatunya Jerman dan lainnya. Perkembangan tersebut menjadikan posisi negara berkembang semakin sulit karena ketatnya persaingan untuk merebut pasar dunia serta langkanya dana murah berupa dana pinjaman luar negeri.

Disamping itu terbentuknya aliansi-aliansi ekonomi seperti Pasar Tunggal Eropa, Kawasan Perdagangan Bebas Antlantik Utara (NAFTA), gagalnya putaran Uruguay dan sebagainya memperlihatkan pula kesulitan-kesulitan lain yang harus dihadapi negara-negara berkembang untuk bersaing di pasar global. Sementara itu, dari dalam terdapat hambatan berupa rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas ini terjadi disebabkan rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat upah, etos kerja yang buruk, serta rendahnya daya saing.

Disatu sisi, sistem pendidikan nasional dituding gagal menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, kreatif dan mandiri. Lembaga pendidikan dinyatakan hanya mampu menciptakan sumber daya manusia yang tergantung nasibnya pada orang atau lembaga yang bisa memakainya. Artinya, produk pendidikan ternyata tidak mampu menyangga kegiatan industri seperti yang diamanatkan oleh GBHN. Bisa dimengerti penyebab tingginya tingkat pengangguran intelektual di Indonesia disebabkan mereka tidak mampu masuk dunia kerja (Merdeka, 10 September 1992).

Pengangguran intelektual ini tidak hanya dikaitkan dengan masalah ketenagakerjaan, melainkan pula berkorelasi erat dengan mutu dunia pendidikan. Ada kecenderungan pendidikan kita menitikberatkan pada kognisi teoritis dan humanitas, sedangkan aplikasi praktis yang ditopang oleh skill keteknikan kurang dipentingkan. Akibatnya mutu lulusan dirasakan masih mengambang dan belum matang menghadapi dunia kerja.

Hal lain yang disorot pada sektor pendidikan ini adalah terlalu banyaknya dikembangkan jurusan atau bidang ilmu sosial. Bidang ilmu sosial dianggap sebagai sumber utama pengangguran intelektual, disebabkan sifat keilmuannya yang tidak bersifat aplikatif langsung untuk kepentingan pertumbuhan pembangunan. Produk disiplin ilmu sosial lebih banyak "berbicara" ketimbang "bekerja", sehingga mereka tidak mampu menciptakan dan menghasilkan hal-hal yang bersifat konkrit. Karena itu yang perlu lebih banyak dihasilkan adalah para lulusan ilmu eksakta, karena mereka lah yang terlibat langsung dengan perkembangan teknologi, industri dan rekayasa.

Sikap yang diambil para decision maker bidang pendidikan dalam mengatasi masalah di atas adalah membuat kebijakan mengurangi jumlah bidang studi ilmu sosial. Menteri Pendidikan, di berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya pengembangan iptek dan mengstatusquokan perkembangan bidang studi ilmu sosial dan humaniora. Bahkan pada bidang studi sosial dan humaniora yang dianggap telah jenuh lulusannya disarankan untuk dihapus. Sebaliknya,



disarankan dan membuka peluang kembali dihidupkannya sekolah-sekolah kejuruan dan terutama politeknik-politeknik yang dianggap lebih bisa menghasilkan produk siap pakai untuk kepentingan dunia industri dan pembangunan pada umumnya (Pelita, 25 Februari 1993).

Bagaimanapun tidak dapat disangkal bahwa pernyataan sinis berganti menteri berganti kebijakan tetap saja tidak bisa dihilangkan. Kebijakan baru memberlakukan kurikulum 1994 terlihat sebagiannya merubah substansi materi pengajaran disekolah. Artinya, konsistensi substansial kelihatannya sukar dipertahankan. Karena berganti menteri berarti juga bergantinya cara pandang dan antisipasi terhadap masalah pendidikan. Apalagi jika menteri pengganti berasal dari filosofi keilmuan yang berbeda. Disinilah letak salah satu problema dimana jabatan menteri bukan merupakan jabatan karir, tapi lebih bersifat politis. Sehingga orang yang ditempatkan pada posisi menteri tersebut tidak mengawali karirnya dari bawah, sehingga kedalamannya memahami persoalan pendidikan relatif terbatas.

Dalam PJPT II ini, kebijakan pendidikan yang bertujuan melayani dunia kerja bersumber dari terminologi baru yaitu konsep keterkaitan (*link*) dan keterpadanan (*match*). Terminologi ini menjadi sangat dikenal berawal dari hasil rencana kerja sama yang erat antara Depdikbud dan Depnaker (Kompas, 1 Mei 1993). Kedua menteri di dua departemen itu sepakat untuk bekerja erat saling mengisi agar pendidikan tidak menghasilkan pengangguran semata. Dari rencana kerjasama formal antara kedua departemen tersebut lahir terminologi *link*

*and match*, yang sebenarnya cara lain untuk mengatakan pendidikan "siap pakai".

Istilah "siap pakai" telah mengundang pro dan kontra antara kalangan teknolog dan para ahli pendidikan, karena memang tidak semudah dikatakan untuk membuat desain sistem pendidikan yang menghasilkan lulusan "siap pakai".

Dari segi perencanaan, mau tidak mau penguasa pendidikan harus melakukan perencanaan pendidikan dengan model *manpower needs approach*. Namun model yang seperti ini mengandung jebakan kebijakan jika tidak didekati secara hati-hati karena masyarakat Indonesia sangat plural dari segi kebutuhan teknologinya. Pertanyaan yang bisa dimunculkan sekitar hal tersebut adalah pendidikan harus dikaitkan dan diselaraskan dengan kebutuhan teknologi masyarakat yang mana? Jawaban bisa jadi ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan politik, sosial dan ekonomi yang sangat kompleks. Disamping itu membuat perencanaan ketenagakerjaan untuk 10-20 tahun kedepan tidaklah mudah, karena sifatnya yang tidak konstan. Harus ada kemampuan untuk mencari hubungan antara *demand side* dan *supply side* di bidang pendidikan.

Alternatif mengembangkan sekolah kejuruan bukanlah tidak mengandung jebakan-jebakan. Hal ini secara tidak langsung adalah bentuk awal Amerika Serikat seperti yang dinyatakan oleh Cohen dan Lazerzon (1977) dimana pendidikan adalah hamba yang melayani kepentingan kapitalisme yang sedang tumbuh. Foster (1977) juga menemukan kekeliruan pemikiran tentang sekolah kejuruan

dalam perencanaan pembangunan. Temuannya di Afrika menyatakan adanya kesenjangan tingkat upah, segmentasi pekerjaan berdasarkan etnis yang mempengaruhi perkembangan sekolah kejuruan. Disamping itu individu-individu yang terlatih itu belum jelas bekerja untuk siapa, karena tidak adanya permintaan nyata di pasar kerja.

Persoalan lain yang lebih mikro dicermati adalah soal *input*, *process* dan *output* dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam sosiologi pendidikan ketiga hal dikenal sebagai *blackbox* yang menentukan hasil pendidikan tersebut (Robinson, 1986). Input yang tidak benar seperti peserta didik yang kurang berkualitas cenderung tidakkan menunjang kepada konsep *link and match*. Peserta didik yang kurang berkualitas dan tidak cocok akan menyebabkan pembenaran terhadap adagium *garbage in, garbage out*. Demikian pula jika prosesnya tidak menunjang, seperti guru yang kurang berkualitas dan kurang menguasai manajemen kelas akan berpengaruh terhadap peserta didik. Bagaimanapun baiknya input dan process tetapi tetap tidak akan memberikan output yang seragam. Akibatnya produktifitas kerja mereka tidak mungkin dibakukan oleh proses pendidikan, jauh sebelum mereka bekerja.

#### Daftar Bacaan

- Aman, Amril, et. al. (1981) "Keragaman Kualitas SLA dan Pola Seleksi Mahasiswa: Suatu Aspek Pemerataan Pendidikan " dalam *Prisma*, No. 2 Februari, LP3ES. Jakarta

- Boudon, Raymond (1977), "Education and Social Mobility: A Structural Model" dalam Jerome Karabel dan A. H. Halsey (ed), *Power and Ideology in Education*. New York: Oxford University Press.
- Carnoy, Martin. (1986), "Education for Alternatif Development", in *New Approach to Comparative Education*, Phillip G. Altbach dan Gail P. Kelly. Chicago (ed. ), ILL: The University of Chicago Press
- Cohen David K and Marvin Lazerson (1977), "Education and Corporate Order", dalam Jerome Karabel dan A. H. Halsey (ed. ), *Power and Ideology in Education*. New York: Oxford Univ. Press
- Farrel, Joseph P. (1982), "Educational Expansion and the Drive for Social Equality", dalam Albatch et all (ed. ), *Comparative Education*. New York: Macmillan Publishing Co. Inc.
- Foster, Phillip J. (1977), "The Vocational School Fallacy in Development Planning", dalam Jerome Karabel dan A. H. Halsey (ed) *Power and Ideology in Education*. New York: Oxford University Press.
- Juoro, Umar (1981), "Problema Pendidikan Tinggi: Aksi Protes Mahasiswa" dalam *Prisma* No. 2 Februari, Jakarta, :LP3ES
- Robinson, Philip (1986), *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali 1986
- Zamroni (1994), *Menuju Praktek Pendidikan Egaliter Demokratis*, makalah yang disampaikan pada seminar Reorientasi Pendidikan Indonesia" di IKIP Muhammadiyah, 7-9 November 1994 di Jakarta.
- \*\*\*\*\* Kumpulan kliping media masa mengenai dunia pendidikan.